

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
OLEH DINAS SOSIAL DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2018**

**Oleh : Yuyun Yunita**

Email : [Yuyunzarra719@gmail.com](mailto:Yuyunzarra719@gmail.com)

**Dosen Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Poverty is a serious problem experienced by some countries in the world. One of the efforts made by the Indonesian government in achieving the country's goals is a program that can prosper the community, and one of the programs made by the Indonesian government is the Family Hope Program (PKH). The Family Hope Program (PKH) has a goal, namely to reduce poverty and existing gaps. but in 2018 in Pekanbaru City, Tenayan Raya was the largest recipient of PKH assistance, the distribution of social assistance funds in Pekanbaru City faced obstacles, there were still those who had not received it, obstacles that arose, among others, invalid PKH data, savings books and ATMs that had not been distributed, lost participant card but has been replaced for a long time. This distribution system is an important part of the evaluation of the family of hope program.*

*This study aims to describe 1). To find out the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) by the Pekanbaru City Social Service in 2018 and 2). Factors that hinder the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) by the Pekanbaru City Social Service in 2018. The method in this study uses a descriptive qualitative approach. The location of the research was carried out at the Social Service and Tenayan Raya District, Pekanbaru City. Data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used is an interactive model.*

*The results of the study concluded that based on the observations and analysis of the researchers were 1). Evaluation of the Family Hope Program by the Social Service in Tenayan Raya District provides an assessment of success for implementation based on an evaluation of the results. 2). Factors that hinder the Evaluation of the Family Hope Program (PKH) by the Social Service in Tenayan Raya Sub-district, Pekanbaru City, namely the lack of understanding of assistants on tasks, data differences between the Ministry of Social Affairs and the central bank which makes PKH social assistance recipients still not receiving assistance, Lack of participation of beneficiaries social services to PKH education.*

*Keywords: Program Evaluation, Poverty, Social Assistance.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah serius yang dialami oleh sebagian Negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di Negara-negara kawasan Afrika, melainkan juga alami dialami di Negara-negara kawasan Asia seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu Negara tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian.

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan Pemberi Bantuan Sosial. Permensos Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana dan terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan.

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi:<sup>1</sup>

1. Sosialisasi dan edukasi
2. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3. Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH

<sup>1</sup> *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan, Op.Cit, hlm: 9*

4. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH
5. Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan asas tugas pembantuan, sesuai dengan pernyataan, berbunyi: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan.

Organisasi Tata Kerja (OTK) Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa: Dinas sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial, dan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial, ini berkaitan dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan permensos Nomor 10 tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Basis Data Terpadu (BDT) Kota Pekanbaru Tahun 2018**

No	Kecamatan	Penduduk Miskin	
		KK	Jiwa
1	Bukit Raya	2.967	29.030
2	Lima Puluh	1.846	7.649
3	Marpoyan Damai	5.207	22.709
4	Payung Sekaki	2.839	12.601
5	Pekanbaru	1.323	5.897

	Kota		
6	Rumbai	4.512	20.053
7	Rumbai Pesisir	4.263	17.983
8	Sail	910	3.720
9	Senapelan	2.186	8.943
10	Sukajadi	2.108	9.025
11	Tampan	6.663	29.030
12	<b>Tenayan Raya</b>	<b>7.469</b>	<b>32.177</b>
<b>Jumlah</b>		<b>42.294</b>	<b>182.58</b>

Sumber: Dinas Sosial dan BPS Kota Pekanbaru

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Dapat dilihat seperti tabel diatas jumlahangka kemiskinan terbanyak pada tahun 2018 di Kecamatan Tenayan Raya berjumlah 32.177 Jiwa dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru tahun 2018, jumlah penduduk kota pekanbaru terdata sebanyak 1.117.358 jiwa. Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas dapat disimpulkan 17,62% penduduk miskin di Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya, sehingga penulis memilih Kecamatan Tenayan sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tenayan Raya yang mendapatkan bantuan sosial PKH masih tergolong sedikit, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Rekapitulasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM )Program Keluarga Harapan (PKH) Dari Tahun 2016 - Tahun 2018 Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Bukit Raya	473	460	878
2	Lima Puluh	431	418	615
3	Marpoyan Damai	618	594	1.350

4	Payung Sekaki	627	610	1.091
5	Pekanbaru Kota	266	259	621
6	Rumbai	908	888	1.876
7	Rumbai Pesisir	632	618	1.483
8	Sail	198	192	273
9	Senapelan	284	279	780
10	Sukajadi	272	270	706
11	Tampan	1.131	1.106	1.955
12	<b>Tenayan Raya</b>	<b>1.302</b>	<b>1.249</b>	<b>2.684</b>
<b>Jumlah</b>		<b>7.142</b>	<b>6.943</b>	<b>14.321</b>

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2019

Tabel diatas merupakan data Penerima Keluarga Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) kota Pekanbaru tahun 2018. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah penerima bantuan sosial PKH ini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi peserta oleh pendamping PKH diseluruh kota Pekanbaru, untuk tahun 2018 Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan yang paling banyak menerima bantuan sosial PKH yang ada di kota pekanbaru yaitu 2.684 KPM. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang memiliki komponen layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosial. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan di Kecamatan Tenayan Raya. Selain itu peneliti menemukan permasalahan dari hasil wawancara Koordinator Tenayan Raya Bapak Yusuf Karuniawan, ia menyatakan:

*“ kami mendapatkan kendala yang ada dimasyarakat penerima bantuan sosial PKH yaitu saldo rekening tidak tersalurkan pada saat pencairan bantuan, serta kartu transaksi untuk PKH belum dapat, dan buku tabungan yang belum selesai, dan terdapatnya penerima bantuan sosial PKH yang ekonominya layak, namun*

*mendapatkan bantuan dikarenakan masalah pada validasi data PKH. (Wawancara Kamis 02 November 2020)*

Adapun pernyataan diatas juga disampaikan oleh Ketua Dinas Sosial Kota Pekanbaru Chairani, yang didapatkan dari [halloriau.com](http://halloriau.com),<sup>2</sup> ada dua permasalahan yang dihadapi yakni, sistem distribusi penyaluran dan data base yang salah sejak awalyang harus kembali dilakukan perbaikan oleh semua pihak terkait. Adapun fenomena uraian diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Data PKH yang tidak valid
2. Buku tabungan dan serta ATM yang belum dibagikan, dan
3. Kartu peserta yang lama diganti

Berdasarkan buku pedoman pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), sistem distribusi penyaluran ini merupakan bagian penting dari evaluasi program keluarga harapan. Berikut adalah dasar dari Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan buku pedoman pelaksana PKH yakni: Pemenuhan kewajiban PKH ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, Pemutakhiran Data, Verifikasi Kewajiban, Penyaluran bantuan, Pertemuan Peningkatan Pertemuan Kemampuan Keluarga (P2K2), Jangka Panjang dan Jangka Pendek.<sup>3</sup> Dari keterangan fenomena dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenaya Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018”**

## Rumusan Masalah

<sup>2</sup> Mimi Purwanti, “penyaluran dana bansos pkh dan bpnt bermasalah komisi iii panggil bri dan dinsos” <http://m.halloriau.com> /2018, tgl 13 Februari 2020 pukul 10.12 wib.

<sup>3</sup> *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, Op. Cit hlm: 7

1. Bagaimana Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat evaluasi Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Oleh Dinas di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenaya Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018.

## Kerangka Teori

### 1. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris, *evaluation*. Menurut pengertian umum, “program” dapat diartikan “rencana”. Sebuah program bukanlah hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervise, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program itusangat bermanfaat terutama bagi pengambilan keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (*decision maker*).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, Cipi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm:29

Dalam perjalanan evaluasi, indikator mencerminkan aspek-aspek program yang paling berarti untuk memantau keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.<sup>5</sup> Ada 7 (tujuh) model evaluasi yang disajikan Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin dalam salah satu bukunya, yaitu:<sup>6</sup>

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai.
2. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Michael Scriven ini dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Model ini sejak awal melihat proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai.
3. *Formatif-Summatif Evaluation Model*, Michael Scriven juga mengembangkan model ini, model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek untuk dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).
4. *Countenance Evaluation Model*, menekankan pada adanya pelaksana dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan.
5. *CSE-UCLA Evaluation Model*, CSE (*Center for the study of Evaluation*) sedangkan UCLA (*University of California in Los Angeles*). Adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu, perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil

<sup>5</sup> Ambiyar, Muharika, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm: 22-23

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Loc. Cit*, hlm: 48

- dan dampak.
6. *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk. (1967) di *Ohio State University*, Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Untuk mengevaluasi program, maka evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya. CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (1967) yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu:
    - a. *Context Evaluation* (evaluasi konteks) Evaluasi Konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek.
    - b. *Input Evaluation* (evaluasi masukan) Pada tahap ini segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Evaluasi masukan ini akan memberikan bantuan agar dapat memberi keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan.
    - c. *Process Evaluation* (evaluasi proses) Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan

didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses, sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal?
  2. Apakah staff yang terlibat di dalam pelaksanaan program akan sanggup menangani kegiatan selama program berlangsung dan kemungkinan dilanjutkan?
  3. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal?
  4. Hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai selama pelaksanaan program dan kemungkinan program dilanjutkan?
- d. *Produk Evaluation* (evaluasi hasil) Evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya, dengan demikian evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program dari suatu program terhadap penerima(KPM), sehingga utama dari evaluasi ini adalah:

1. Kapan program bisa dikatakan telah berhasil mencapai tujuannya?
  2. Bagaimana masyarakat akan menjadi berbeda setelah menerima program yang sedang dijalankan?
7. *Discrepancy Model*, model yang dikembangkan oleh Malcolm provus ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya Kesenjangan di dalam pelaksanaan program.

## 2. Kemiskinan

Definisi kemiskinan ada tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural.

Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor- faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.<sup>7</sup>

Adapun peran organisasi lokal, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi demikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.<sup>8</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Evaluasi Program Keluarga Harapan Oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya

Evaluasi adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan PKH dengan menggunakan indikator dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan dari seluruh tahapan pelaksanaan program. Kegiatan evaluasi didasarkan atas hasil dan dampak pelaksanaan PKH. Tujuan evaluasi PKH yaitu untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan yang telah disusun dalam rencana kerja tahunan, mengetahui dan menganalisa hal-hal yang mungkin timbul diluar yang telah rencana dan memberikan masukan kepada penanggungjawab PKH mengenai upaya perbaikandalam perencanaan maupun

<sup>7</sup> Djoko Sudantoko, *Dasar-dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: PT. PP Madi Mulyo, 2009), hlm: 43-46

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm: 16

dalam pelaksanaan PKH.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Tenayan Raya oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2018, dibuatkan beberapa indikator yang menjadi bahan untuk menggali permasalahan pelaksanaan program. Indikator penilaian didasarkan pada aspek-aspek konteks (*Context*), masukan (*Input*), proses (*Process*), hasil (*Product*).

**Tabel 3 Indikator Penilaian Program PKH**

No	Aspek	Indikator Penilaian
1	Konteks	1) Kebutuhan penerima bantuan sosial PKH 2) Manfaat PKH kepada penerima bantuan sosial PKH
2	Masukan	1) Penerima PKH 2) Tenaga Pendamping
3	Proses	1) Proses pelaksanaan Program PKH 2) Proses pengawasan dan keterlibatan unsur internal dan eksternal

4	Hasil	1) Pencapaian tujuan PKH 2) Dampak PKH kepada penerima bantuan sosial
---	-------	--

*Sumber: Olahan peneliti Tahun 2020*

Untuk evaluator dalam pelaksanaan evaluasi PKH yang menjadi penanggungjawab atau pelaksana di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2018 yaitu: Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bank Penyalur (KP dan KC), dan Pendamping Sosial PKH.

Seperti yang sudah dijelaskan di teori model evaluasi konteks ini adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Berdasarkan pengertian evaluasi konteks maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur evaluasi konteks dalam evaluasi program keluarga harapan (PKH) yaitu kebutuhan dan manfaat PKH kepada penerima bantuan.

#### **A. Evaluasi Konteks**

Seperti yang sudah dijelaskan di teori model evaluasi konteks ini adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, dan tujuan proyek. Berdasarkan pengertian evaluasi konteks maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur evaluasi konteks dalam evaluasi program keluarga harapan (PKH) yaitu kebutuhan dan manfaat PKH kepada penerima bantuan.

<sup>9</sup> *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, 2019, hlm: 67

**Tabel 4. Matriks Evaluasi Konteks PKH  
di Kecamatan Tenayan Raya KotaPekanbaru tahun 2018**

No	Jenis Evaluasi	Kriteria Evaluasi	
		Komponen/aspek yang di evaluasi	Penilaian
1	Konteks	a. Kebutuhan Penerima Bantuan Sosial PKH	a. Dari aspek pendidikan mereka tidak ada yang bermasalah, semuanya turut berpartisipasi dalam menyelesaikan pendidikan, penilaian ini dilihat dari kehadiran dan proses belajar sehari-hari. Semua kebutuhan sekolah mereka sangat terbantu dengan adanya program PKH b. Untuk kesehatan dan kesejahteraan sosial, setiap peserta telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gizi baik ibu yg sedang hamil maupun anak-anak, tentunya terbantu untuk kebutuhan kesehatan mereka
		a. Manfaat PKH kepada Penerima Bantuan	a. Semua komponen yang terlibat merasakan manfaat dari PKH

*Sumber: Olahan peneliti Tahun 2020*

**B. Evaluasi Masukan**

Pada tahap ini segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Evaluasi masukan ini akan memberikan bantuan agar dapat memberi keputusan, menentukan sumber-sumber yang

dibutuhkan. Berdasarkan pengertian evaluasi masukan maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur evaluasi masukan dalam evaluasi program keluarga harapan (PKH) yaitu Penerima Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga pendamping.

**Tabel 5. Matriks Evaluasi Masukan PKH  
di Kecamatan Tenayan Raya KotaPekanbaru tahun 2018**

No	Jenis Evaluasi	Kriteria Evaluasi	
		Komponen/aspek yang di evaluasi	Penilaian
1	Masukan	a. Penerima PKH	a. Untuk penerima PKH menggunakan BDT kemiskinan melalui BPS kementerian sosial, BDT yang digunakan masih data tahun 2015
		b. Tenaga	b. Dari kriteria yang ditentukan untuk persyaratan

		Pendamping	pendamping yaitu S1. Latar belakang pendidikan tenaga pendamping UUPKH Kecamatan Tenayan Raya adalah orang S1, dan satu orang yang sudah diklat
--	--	------------	---

Sumber: Olahan peneliti Tahun 2020

### C. Evaluasi Proses

Evaluasi proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggungjawab program, “kapan” (when) kegiatan akan selesai. Dalam

model CIPP, evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang Dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Oleh Stufflebeam diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses,

**Tabel 6 Matriks Evaluasi Proses PKH**

**di Kecamatan Tenayan Raya KotaPekanbaru tahun 2018**

No	Jenis Evaluasi	Kriteria Evaluasi	
		Komponen/aspek yang di evaluasi	Penilaian
1	Proses	a. Proses Pelaksanaan Program PKH ( perencanaan, penetapan calon peserta PKH, pertemuan awal dan validasi, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran bantuan, pendampingan, P2K2, dan verifikasi komitmen )	a. Semua proses pelaksanaan program PKH yang tertera sesuai dengan agenda, adapun setiap jumlah nominal bantuan peserta pendidikan SD Rp. 225.000, SMP Rp. 375.000, SMA Rp. 472.000, dan Balita/ Lansia/Ibu hamil/ Disabilitas Rp. 500.000, tahapan penyaluran empat kali bertahap.
		b. Proses	b. Pengawasan dari pendamping selalu memverifikasi

		pengawasan dan keterlibatan unsur internal dan eksternal	setiap peserta PKH setelah proses pencairan selesai dilaksanakan, adapun verifikasi yang dilakukan, yaitu verifikasi pendidikan (pihak sekolah) dan kesehatan (pihak puskesmas) yang berpedoman dibuku petunjuk teknis dan pelaksanaan PKH
--	--	--	--

Sumber: Olahan peneliti Tahun 2020

#### D. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya, dengan demikian evaluasi ini diarahkan pada keseluruhan dampak dari suatu program dari suatu program terhadap penerima bantuan sosial PKH. Berdasarkan pengertian evaluasi

hasil maka indikator yang dapat digunakan untuk mengukur evaluasi hasil dalam evaluasi program keluarga harapan (PKH) yaitu pencapaian tujuan program dan dampak program.

**Tabel 6 Matriks Evaluasi Proses PKH**

**di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tahun 2018**

No	Jenis Evaluasi	Kriteria Evaluasi	
		Komponen/aspek yang di evaluasi	Penilaian
1	Hasil	a. Pencapaian tujuan PKH	a. Tujuan tersebut sudah berhasil tercapai, dilihat dari respon penerima bantuan sosial PKH yang merasa terbantu dengan besaran bantuan yang diberikan oleh program PKH
		b. Dampak PKH kepada penerima bantuan	b. Dalam proses pelayanan dan pelaksanaan UUPKH di Kecamatan Tenayan Raya telah memberikan banyak manfaat. Program ini harus tetap berjalan karena program ini sangat membantu keluarga miskin yang masuk dalam syarat komponen PKH sebagai bantuan bersyarat.

Sumber: Olahan peneliti Tahun 2020

## 2. Faktor yang menghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya

### 2.1 Internal

#### 2.1.1 Kurangnya Pemahaman Pendamping Terhadap Tugas

permasalahan yang terjadi karena lambat melaporkan ke pihak Bank penyalur mengenai kehilangan, dan dikarenakan sistem bank yang ngantri, mengakibatkan keterlambatan proses penggantian kartu peserta PKH, ATM yang hilang, dan buku bank yang belum siap, sehingga pada saat penyaluran dana

PKH untuk peserta terjadi kendala. Untuk Kecamatan Tenayan Raya kendala yang dihadapi kepada penerima yaitu penumpukannya PKH selama dua tahun sehingga keluar pada tahap berikutnya dengan nominal dua belas juta. Adapun terkait ATM yang hilang ataupun terblokir pihak pengguna melaporkan terlebih dahulu ke Polsek setempat guna membuat laporan kehilangan dan selanjutnya melaporkan ke Bank penyalur di dampingi oleh pendamping agar mengetahui proses permasalahannya.

## 2.2 Eksternal

### 2.2.1 Perbedaan Data

permasalahan dari data base melainkan kesalahan dari Administrator pangkalan data/ data base yang kurang teliti dalam mendistribusikan data PKH sehingga terjadi lah perbedaan data antara Kementerian Sosial dengan Bank pusat yang membuat penerima bantuan sosial PKH diantaranya masih belum menerima bantuan.

## 2.3 Eksternal

### 2.3.1 Kurangnya Partisipasi Penerima Bantuan Sosial Terhadap Edukasi P KH

kegiatan P2K2 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping, dan pesertanya merupakan penerima bantuan sosial PKH, koordinator pendamping juga menjelaskan tidak semua penerima bantuan PKH mengikuti kegiatan P2K2 di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2018, pendamping juga memberikan peringatan berupa sanksi kepada penerima bantuan PKH yang tidak mengikuti kegiatan, tetapi tetap saja tidak ada yang menanggapi dengan serius.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a) Evaluasi Program Keluarga Harapan menggunakan model evaluasi sebagai indikator , dari tujuh model evaluasi yang ada di buku Suharsimi Arikunto dan Cepi safruddin, peneliti memilih menggunakan model *CIPP Evaluation Model* dikembang oleh stufflebeam dkk (1967) untuk mengukur evaluasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya tahun 2018. Model ini mempunyai empat indikator, yaitu *evaluasi konteks*, *evaluasi masukan*, *evaluasi proses* dan *evaluasi hasil*. Evaluasi Program Keluarga Harapan oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya memberikan penilaian keberhasilan untuk Program PKH hal ini berdasarkan penilaian hasil yang mana adanya peserta yang telah graduasi mandiri ini tentunya

mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Tenayan Raya dari Program PKH.

b) Faktor yang menghambat Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinas Sosial di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2018 yaitu kurangnya pemahaman pendamping terhadap tugas, perbedaan data antara Kementerian Sosial dengan Bank pusat yang membuat penerima bantuan sosial PKH diantaranya masih belum menerima bantuan, Kurangnya partisipasi penerima bantuan sosial terhadap edukasi PKH yang mana tidak semua penerima bantuan PKH mengikuti kegiatan P2K2 di Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2018.

## 2. Saran

- a) Hendaknya Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan dapat memfokuskan pada proses penyadaran penerima bantuan sosial PKH agar mereka tidak ketergantungan serta tidak ada lagi menuai kendala untuk kedepannya, serta kesadaran terhadap penerima dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pendamping sebagai bentuk bantuan bersyarat.
- b) Koordinasi antar lembaga harus di tingkatkan lagi, koordinasi lembaga PKH dengan lembaga-lembaga pemerintah yaitu, lembaga pendidikan dan kesehatan, hal ini perlu dilakukan karena koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah tersebut akan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berjalan secara efektif.
- c) Meningkatkan kinerja program dan pemahaman untuk pelaksana dan pendamping dalam bantuan sosial PKH agar program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan dalam permensos nomor 10 tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ambiyar, Muharika. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*.

Bandung: Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi, Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2018. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ananda, Rusydi, Tien Rafida. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing.

Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Candi Gerbang.

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Deepublish, Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Fomulas, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Darwin, Muhadir M. 2005. *Negara dan Perempuan-Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana.

Girsang, Wardis. 2011. *Kemiskinan Multidimensional di Pulau-pulau Kecil*. Ambon: Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora. Partini, Siti. 2011. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta:

Ar-Ruzz Media.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi offset.

Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudantoko, Djoko. 2009. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT. PP Madi Mulyo.

### Studi Terdahulu

Saputra, Taufik Widia. 2016. *Kerjasama Pemerintah Desa Pasar Baru Pangean Dengan Camat Dalam Menuntaskan Kemiskinan Di Kecamatan Pangean Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)*.

Saputra, Yosa. 2016. *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

### Dokumen

Kementerian Sosial RI, *Buku Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial,

2016.

Kementerian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2018.

Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, 2019.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Panduan Penanggulangan Kemiskinan: Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*, Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), cet. Pertama, 2011.

Kementerian Sosial RI, *Administrator Data Base dan Pengenalan Basis Data*, Jakarta: Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2018.

## Website

<https://pkh.kemsos.go.id.id/?pg=tentangpkh-1>. (diakses pada tanggal 4 agustus 2020 pukul 16.33 WIB)

<https://www.kemsos.go.id/mensos-usulan-batasan-usia-lansia-jadi-65-tahun>. (diakses pada tanggal 10 agustus 2020 pukul 19.47 WIB)

<https://m.halloriau.com/read-105589-2018-09-24-penyaluran-dana-bansos-pkh-dan-bpnt-bermasalah-komisi-iii-panggil-bri-dan-dinsos.html> (diakses pada tanggal 11 agustus 13.15 WIB)

<https://kemsos.go.id/ar/tinjau-pelaksanaan-p2k2-mensos-beri-edukasi-kepada-kpm-pkh> (diakses pada tanggal 13 agustus 20.00 WIB)